

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengidentifikasi permasalahan pengangguran sebagai salah satu isu krusial yang masih dihadapi oleh Indonesia, khususnya di tingkat pemerintah daerah seperti Kota Semarang yang memiliki jumlah penduduk dengan angkatan kerja terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Pasal 5 dari Undang-Undang tersebut menegaskan prinsip bahwa setiap anggota tenaga kerja memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, kerja sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk suatu badan atau dinas yang bertujuan mendukung pembangunan dan aspek sosial, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi sangat penting. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Tugas dan fungsi dinas ini meliputi penyediaan informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan jabatan, dan juga sebagai perantara kerja. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam upaya mengurangi pengangguran terdidik di Kota Semarang, serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam mengurangi pengangguran terdidik di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Dalam Upaya Mengurangi Pengangguran Terdidik di Kota Semarang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan data disajikan melalui kombinasi studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam mengatasi pengangguran melibatkan sejumlah strategi, termasuk peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah, peningkatan penempatan tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan melalui program pelatihan. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti penggunaan instruktur eksternal dalam pelatihan dan keterbatasan anggaran yang menghambat pemenuhan standar sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang mengikat bagi pelaku usaha untuk bekerja sama dalam menyerap lulusan pelatihan, baik dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang maupun lembaga pelatihan lainnya, terutama terkait pembiayaan.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja, Pengangguran.

ABSTRACT

Law Number 13 of 2003 concerning Employment identifies the problem of poverty as one of the crucial issues still facing Indonesia, especially at the regional government level such as the City of Semarang which has the largest population and workforce in Central Java Province. Article 5 of the Law confirms the principle that every member of the workforce has the same rights without discrimination in obtaining work. Therefore, cooperation with local governments in forming an agency or service aimed at supporting development and social aspects, especially in improving community welfare and empowerment, is very important. The Semarang City Manpower Department is responsible for ensuring that residents get jobs that suit their interests, talents and abilities. The duties and functions of this service include providing information about job vacancies, training, counseling, job guidance, and also as an employment intermediary. This legal writing aims to find out the role of the Manpower Service (Disnaker) in efforts to reduce educated unemployment in Semarang City, as well as what factors support and hinder the role of the Manpower Service (Disnaker) in reducing educated unemployment in Semarang City.

The approach method applied in this research is an empirical juridical approach. Data collection was carried out through two main sources, namely primary data and secondary data. This research adopts a descriptive analytical approach which aims to provide a comprehensive picture of the implementation of the role of the Semarang City Manpower Department in efforts to reduce educated unemployment in Semarang City. The data analysis method used is qualitative analysis, with data presented through a combination of field studies and literature studies.

The results of this legal writing can be concluded that the role of the Semarang City Employment Service in overcoming unemployment involves several strategies, including improving the quality of local government services, increasing workforce placement, and increasing skills through training programs. However, there are several obstacles faced, such as the use of external instructors in training and budget limitations which hinder the fulfillment of facilities and infrastructure standards. Therefore, binding regulations are needed for business actors to synergize in absorbing training graduates, both from the Semarang City Manpower Office and other training institutions, especially regarding financing.

Keywords: Role, Government, Manpower Department, Unemployment.